



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WISNU HARYANA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS BADAN**
3. NHK : **112579**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.217.000.000

1. Tanah Seluas 1730 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 355.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/94 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/108 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 966.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.296.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 862.000.000

1. MOTOR, YAMAHA AEROX SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, TOYOTA INOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.846.799.873**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 8.970.799.873



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.970.799.873

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.